

## Menganalisis Konflik dan Proses Politik di Indonesia dan Upaya Otoritas Menanganinya

Aditya Nanda Saputra<sup>1</sup>, Mohammad Aditya AB<sup>2</sup>, Surya Sukti<sup>3</sup>  
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Palangkaraya<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [adityanandasaputra03@gmail.com](mailto:adityanandasaputra03@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima Tgl-Bln-Thn  
Disetujui Tgl-Bln-Thn  
Diterbitkan Tgl-Bln-Thn

### ABSTRACT

*Conflict in society is a complex social phenomenon and inseparable from the dynamics of human life. This study aims to analyze the factors that trigger conflict in society, the role of government authorities in handling conflict, the forms of horizontal and vertical conflict, and the conflict resolution process from a political perspective. The method used is a qualitative approach with library research, which utilizes various sources of the latest scientific literature as secondary data. The results show that conflict is triggered by various interrelated factors, such as social and economic inequality, differences in identity, political dynamics, weak social integration, and suboptimal law enforcement. The government has a strategic role as a regulator, mediator, and stabilizer in resolving conflict, but its success depends heavily on the quality of governance and the level of public trust. Social conflict is classified into horizontal and vertical conflicts, which have different characteristics but influence each other. Meanwhile, political conflict resolution requires a multidimensional approach through negotiation, public policy, legal instruments, and community participation. Thus, a comprehensive and sustainable approach is needed in managing conflict to maintain social stability and national integration.*

**Keywords:** *social conflict, conflict triggers, horizontal conflict, vertical conflict, conflict resolution, role of government*

### ABSTRAK

Konflik dalam masyarakat merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu konflik dalam masyarakat, peran otoritas pemerintah dalam menangani konflik, bentuk konflik horizontal dan vertikal, serta proses resolusi konflik dalam perspektif politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang memanfaatkan berbagai sumber literatur ilmiah terbaru sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, perbedaan identitas, dinamika politik, lemahnya integrasi sosial, serta kurang optimalnya penegakan hukum. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, mediator, dan stabilisator dalam menangani konflik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik. Konflik sosial diklasifikasikan menjadi konflik horizontal dan vertikal yang memiliki karakteristik berbeda tetapi saling memengaruhi. Sementara itu, resolusi konflik politik memerlukan pendekatan multidimensional melalui negosiasi, kebijakan publik, instrumen hukum, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengelola konflik guna menjaga stabilitas sosial dan

integrasi nasional.

**Kata kunci:** konflik sosial, faktor pemicu konflik, konflik horizontal, konflik vertikal, resolusi konflik, peran pemerintah

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Saputra, A. N., Aditya AB, M. ., & Sukti, S. . (2026). Menganalisis Konflik dan Proses Politik di Indonesia dan Upaya Otoritas Menanganinya. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), Saputra. <https://doi.org/10.63822/qjx0gz43>

## **PENDAHULUAN**

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan dinamis. Perbedaan kepentingan, nilai, serta latar belakang sosial yang beragam menjadikan konflik sebagai sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertentangan semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang dapat memengaruhi stabilitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, bentuk serta penyebab konflik dalam masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan. Konflik tidak lagi hanya dipicu oleh faktor sederhana, melainkan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti ketimpangan ekonomi, perbedaan identitas sosial, dinamika politik, serta lemahnya tata kelola pemerintahan. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif agar konflik dapat dianalisis secara tepat dan ditangani secara efektif.

Selain itu, peran pemerintah sebagai pemegang otoritas menjadi sangat krusial dalam mengelola dan menyelesaikan konflik. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam menciptakan stabilitas sosial. Dalam praktiknya, keberhasilan penanganan konflik sangat bergantung pada legitimasi, keadilan, serta kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, konflik sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya konflik horizontal dan konflik vertikal, yang masing-masing memiliki karakteristik serta penyebab yang berbeda. Pemahaman terhadap jenis-jenis konflik ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penyelesaian yang tepat. Lebih lanjut, dalam konteks politik, konflik sering kali berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan, sehingga membutuhkan pendekatan resolusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai faktor-faktor pemicu konflik dalam masyarakat, peran otoritas pemerintah dalam menangani konflik, bentuk konflik horizontal dan vertikal, serta proses resolusi konflik dalam perspektif politik. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika konflik serta upaya penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat modern.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Konflik sosial merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, konflik dipahami sebagai proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, maupun distribusi sumber daya antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut teori konflik, ketimpangan sosial dan perebutan sumber daya menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya konflik (Anwar & Widiani, 2016).

Dalam konteks masyarakat modern, konflik tidak lagi bersifat sederhana, melainkan melibatkan berbagai dimensi yang kompleks, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya, sering kali menjadi pemicu utama konflik karena adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Selain itu, perbedaan identitas seperti agama, etnis, dan budaya juga berpotensi memicu konflik, terutama ketika identitas tersebut dipolitisasi dalam kepentingan tertentu (Sutisna, 2023).

Lebih lanjut, konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan relatif setara, seperti konflik antar etnis atau antar komunitas. Sementara itu, konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau otoritas yang memiliki kekuasaan, biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan publik atau ketidakadilan dalam sistem pemerintahan (Jagad, 2026).

Dalam menghadapi konflik, peran pemerintah sangat penting sebagai aktor utama yang memiliki legitimasi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik. Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang membuat kebijakan, mediator yang menjembatani pihak-pihak yang berkonflik, serta stabilisator yang menjaga ketertiban sosial. Keberhasilan pemerintah dalam menangani konflik sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Marta & Fuqaha, 2015).

Di sisi lain, resolusi konflik dalam perspektif politik merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai pendekatan, seperti negosiasi, kompromi, penggunaan instrumen hukum, serta kebijakan publik. Resolusi konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sosial dan legitimasi politik. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Chasib, 2024).

Selain itu, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa konflik sosial sering kali merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk lemahnya integrasi sosial, kurangnya komunikasi antar kelompok, serta tidak optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memahami serta mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas (Dhiaulhaq et al., 2024).

Dengan demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pemahaman terhadap faktor penyebab, jenis konflik, peran pemerintah, serta mekanisme resolusi konflik menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi penanganan konflik yang efektif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena konflik dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor penyebab, peran pemerintah, bentuk konflik, serta proses resolusinya dalam perspektif sosial dan politik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik konflik sosial dan politik. Penelitian ini secara khusus mengutamakan sumber-sumber

terbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir guna memastikan aktualitas dan relevansi data yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan kredibilitas sumber, kesesuaian dengan tema, serta kontribusinya terhadap pembahasan yang dilakukan.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam proses ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai konsep dan temuan dari literatur yang ada. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara faktor-faktor penyebab konflik, peran pemerintah, serta bentuk dan resolusi konflik dalam masyarakat.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai dinamika konflik dalam masyarakat serta upaya penanganannya dalam perspektif sosial dan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor- Faktor Pemucu Konflik Dalam Masyarakat

Konflik dalam masyarakat adalah fenomena sosial yang merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan manusia dan memiliki berbagai latar belakang, kepentingan, dan nilai. Konsekuensinya, konflik terjadi ketika ada pertentangan antara individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan, persepsi, atau distribusi sumber daya. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik di masyarakat modern semakin kompleks seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.

Salah satu faktor utama pemucu konflik adalah **ketimpangan sosial dan ekonomi**. Ketidakmerataan distribusi sumber daya, seperti akses terhadap lahan, pekerjaan, maupun pendapatan, sering kali menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada konflik terbuka. Dalam studi konflik pertanahan, misalnya, konflik terjadi akibat ketidakjelasan hak kepemilikan lahan serta ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan, yang memicu resistensi masyarakat terhadap pihak yang dianggap merugikan mereka (Anwar & Widiani, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial.

Selain faktor ekonomi, **perbedaan identitas sosial seperti agama, etnis, dan budaya** juga menjadi pemucu signifikan konflik dalam masyarakat. Identitas kolektif sering kali dimobilisasi dalam berbagai kepentingan, terutama dalam konteks politik, sehingga memperkuat polarisasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa politisasi identitas, seperti penggunaan isu agama dan etnis, berpotensi meningkatkan eskalasi konflik karena memicu sentimen emosional yang kuat di masyarakat (Sutisna, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, yang berkaitan dengan nilai dan keyakinan.

Selain itu, komponen politik memiliki peran yang signifikan dalam menyebabkan perselisihan, terutama dalam hal demokrasi elektoral. Ketidaksetujuan politik, seperti penyebaran disinformasi, pembentukan faksi, dan persaingan kekuasaan, dapat menghalangi perubahan sosial. Seringkali,

konflik internal dalam organisasi politik sendiri disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan di antara elit, yang kemudian berdampak pada masyarakat luas. Dengan demikian, ketidakpastian politik dapat menyebabkan konflik horizontal di masyarakat.

Di sisi lain, **faktor sosial-budaya** seperti lemahnya integrasi sosial dan kurangnya komunikasi antar kelompok juga berkontribusi terhadap munculnya konflik. Ketika interaksi sosial tidak berjalan dengan baik, muncul kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam konteks konflik di Papua, misalnya, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung lama memperumit situasi konflik yang ada (Dhiaulhaq et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konflik sering kali merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan adalah faktor lain yang menyebabkan konflik. Jika penegakan hukum tidak adil dan negara tidak hadir untuk menyelesaikan sengketa, masyarakat dapat mengambil tindakan sendiri, yang dapat memperburuk konflik. Studi tentang kemungkinan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya institusi dan peraturan, menjadi ukuran penting untuk mengukur kerentanan konflik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam masyarakat dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, hingga kelembagaan. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan merusak tatanan sosial.

### **Otoritas Pemerintah Dalam Menangani Konflik**

Untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional, otoritas pemerintah dalam menangani konflik sangat penting. Dalam ilmu politik dan sosiologi, pemerintah diakui sebagai aktor utama dalam mengelola, meredam, dan menyelesaikan konflik masyarakat. Legitimasi ini berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan sistem hukum, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang direncanakan dalam berbagai tahapan konflik, baik preventif, represif, maupun resolutive.

Pemerintah bertindak sebagai pengaturan dan mediator dalam penanganan konflik. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan menetapkan kebijakan dan peraturan untuk mencegah konflik, seperti peraturan tentang distribusi sumber daya, perlindungan hak minoritas, dan penegakan hukum yang adil. Ketika regulasi tidak efektif atau tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara merata, konflik dapat muncul. Studi menunjukkan bahwa karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan, kurangnya pelaksanaan kebijakan publik sering menjadi faktor yang menyebabkan konflik sosial.

Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Dalam peran ini, pemerintah bertindak sebagai pihak netral yang menjembatani kepentingan kelompok-kelompok yang berkonflik. Proses mediasi yang efektif menuntut adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena tanpa legitimasi sosial, intervensi pemerintah justru dapat memperburuk konflik. Studi mengenai resolusi konflik sosial di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Marta & Fuqaha, 2015).

Lebih lanjut, pemerintah memiliki otoritas dalam penggunaan **instrumen koersif**, seperti aparat keamanan, untuk mengendalikan konflik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, penggunaan kekuatan ini harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip hukum, karena tindakan represif yang berlebihan justru dapat memicu konflik yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, pendekatan keamanan yang tidak sensitif terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat terbukti memperpanjang konflik dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Jagad, 2026). Oleh karena itu, pendekatan keamanan harus diimbangi dengan pendekatan dialogis dan persuasif.

Selain aspek penanganan langsung, otoritas pemerintah juga tercermin dalam kemampuannya membangun **sistem pencegahan konflik (*conflict prevention system*)**. Hal ini meliputi deteksi dini potensi konflik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan komunikasi antar kelompok masyarakat. Pemerintah yang responsif terhadap dinamika sosial akan lebih mampu mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem peringatan dini konflik berbasis masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dalam mencegah eskalasi konflik (Abdulah, 2023).

Di sisi lain, keberhasilan pemerintah dalam menangani konflik juga sangat bergantung pada kualitas **tata kelola pemerintahan (*good governance*)**. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah mampu menunjukkan integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum, maka legitimasi akan meningkat, sehingga mempermudah proses resolusi konflik. Sebaliknya, praktik korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan akan memperlemah otoritas pemerintah dan memicu konflik baru.

Oleh karena itu, otoritas pemerintah dalam menangani konflik tidak hanya melibatkan penggunaan kekuasaan formal; itu juga melibatkan membangun legitimasi, kepercayaan, dan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. Pemerintah harus menggabungkan berbagai pendekatan hukum, sosial, politik, dan budaya agar penanganan konflik dapat berlangsung dan berkelanjutan.

### **Konflik Horizontal Dan Konflik Vertikal**

Konflik sosial adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dinamika kehidupan masyarakat yang beragam. Konflik dalam sosiologi konflik dapat dikategorikan menurut posisi para pihak yang terlibat; ini dikenal sebagai konflik horizontal dan vertikal. Kedua jenis konflik ini memiliki karakteristik, sumber, dan konsekuensi yang berbeda, tetapi seringkali saling berpengaruh.

Konflik horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dalam posisi sosial yang relatif setara. Konflik ini umumnya muncul di antara kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sejajar, seperti antar etnis, antar agama, maupun antar komunitas dalam satu wilayah. Faktor utama pemicu konflik horizontal sering kali berkaitan dengan perbedaan identitas, kepentingan, serta persepsi yang tidak selaras. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan nilai dan budaya yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu prasangka sosial dan diskriminasi, yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi sosial dan kurangnya komunikasi antar kelompok menjadi faktor dominan dalam memicu konflik horizontal, terutama di daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi (Sutisna, 2023).

Selain itu, persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas, seperti lahan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik, sering menyebabkan konflik horizontal. Kelompok masyarakat tertentu dapat merasa dirugikan ketika sumber daya didistribusikan secara tidak adil. Ini dapat menyebabkan konflik dengan kelompok masyarakat yang lebih diuntungkan. Dalam situasi ini, konflik horizontal memiliki sifat kultural dan ekonomi. Oleh karena itu, karena menyangkut identitas dan keberlangsungan hidup kelompok, konflik jenis ini sering kali melibatkan emosi kolektif yang tinggi.

Konflik vertikal, di sisi lain, didefinisikan sebagai konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan, seperti pemerintah atau lembaga negara. Ketidakpuasan terhadap kebijakan, ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan, dan kurangnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat adalah faktor utama yang sering menyebabkan konflik ini. Banyak kali, konflik vertikal dimulai sebagai reaksi terhadap sistem kekuasaan yang dianggap tidak adil atau represif. Studi baru menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah untuk mengelola kebijakan publik secara inklusif dan partisipatif seringkali dikaitkan dengan konflik vertikal.

Konflik vertikal juga dapat dipicu oleh tindakan represif aparat negara dalam menangani konflik sosial. Pendekatan keamanan yang tidak proporsional dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga meningkatkan eskalasi konflik. Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah konflik dapat diselesaikan secara damai atau justru berkembang menjadi konflik yang lebih luas (Jagad, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa konflik vertikal tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga dengan legitimasi dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Konflik horizontal dan vertikal sering berinteraksi meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika masyarakat menuntut intervensi pemerintah atau merasa pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik, konflik horizontal dapat berkembang menjadi konflik vertikal. Sebaliknya, ketika kebijakan pemerintah dianggap memihak kelompok tertentu, konflik vertikal dapat memicu konflik horizontal, yang menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kedua jenis konflik ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik sosial di masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu, mengetahui tentang konflik horizontal dan vertikal sangat penting untuk membuat strategi yang efektif untuk menangani konflik. Untuk mengatasi kedua jenis konflik ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mempertimbangkan keadilan sosial, komunikasi antar kelompok, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Konflik dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan jika tidak ada upaya yang sistematis dan berkelanjutan.

### **Resolusi Konflik Dan Politik**

Konflik politik biasanya terjadi karena perebutan sumber daya kekuasaan, perbedaan ideologi, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, resolusi konflik politik bertujuan untuk tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dan legitimasi daripada konflik.

Dalam praktiknya, resolusi konflik politik sering dilakukan melalui pendekatan **negosiasi dan kompromi antar aktor politik**. Dalam sistem demokrasi multipartai, konflik antar elit politik merupakan hal yang tidak terhindarkan, terutama dalam proses pemilu dan pembentukan koalisi.

Penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam koalisi politik, seperti pada Pemilu 2024 di Indonesia, dapat diselesaikan melalui negosiasi strategis yang melibatkan pembagian kekuasaan dan kesepakatan politik antar partai (Harto et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa resolusi konflik politik sering kali bersifat pragmatis dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan.

Selain itu, resolusi konflik politik juga dapat dilakukan melalui pendekatan **politik hukum (legal politics)**, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme hukum internasional dengan melibatkan organisasi seperti PBB dan ASEAN (Nizar & Hastri, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat legitimasi dalam menyelesaikan konflik politik, terutama dalam konteks hubungan internasional.

Kebijakan publik sering digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik di tingkat domestik. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan otonomi khusus di Papua dalam upaya meredakan konflik yang telah lama berlangsung antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi masyarakat daerah lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaannya yang adil dan menanggapi permintaan masyarakat.

Lebih lanjut, resolusi konflik politik juga menekankan pentingnya **pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat**. Keterlibatan aktor lokal, seperti tokoh adat dan pemimpin masyarakat, terbukti mampu memperkuat legitimasi proses perdamaian serta menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam studi mengenai konflik Papua, pendekatan berbasis masyarakat dan pembangunan berkeadilan menjadi faktor penting dalam mendukung resolusi konflik yang berkelanjutan (Chasib, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak dapat hanya dilakukan secara top-down, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebaliknya, resolusi konflik politik menghadapi banyak masalah. Ini termasuk kepentingan elit, ketidaksesuaian kekuasaan, dan ketidakpercayaan antara pihak yang berkonflik. Polarisasi politik dan persaingan antar kelompok sering meningkatkan kemungkinan konflik dalam situasi politik nasional, seperti menjelang pemilu. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang luas untuk menangani konflik, yang mencakup penegakan hukum yang adil, penguatan institusi, dan peningkatan pengetahuan politik masyarakat.

Dengan demikian, resolusi konflik dalam politik merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari negosiasi, hukum, kebijakan publik, hingga partisipasi masyarakat. Keberhasilan resolusi konflik sangat ditentukan oleh kemampuan aktor politik dalam membangun konsensus, menjaga legitimasi, serta mengakomodasi kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Konflik dalam masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dan tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial. Konflik muncul sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, perbedaan identitas (agama, etnis, dan budaya), dinamika politik, lemahnya integrasi sosial, serta kurang optimalnya penegakan hukum dan tata kelola

pemerintahan. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut aspek simbolik, struktural, dan kultural dalam masyarakat.

Dalam konteks penanganan konflik, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor utama yang memiliki legitimasi untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai regulator, mediator, serta pengguna instrumen keamanan. Namun demikian, keberhasilan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang hanya bersifat represif tanpa diimbangi dialog dan partisipasi masyarakat justru berpotensi memperburuk konflik.

Lebih lanjut, konflik sosial dapat dibedakan menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan relatif setara dan umumnya dipicu oleh perbedaan identitas serta persaingan sumber daya. Sementara itu, konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau otoritas yang berkuasa, yang biasanya dipicu oleh ketidakadilan, kebijakan yang tidak responsif, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua jenis konflik ini sering kali saling berkaitan dan dapat berkembang satu sama lain jika tidak ditangani secara tepat.

Dalam perspektif politik, resolusi konflik merupakan proses yang bersifat multidimensional dan memerlukan berbagai pendekatan, seperti negosiasi, kompromi, penggunaan instrumen hukum, kebijakan publik, serta pelibatan masyarakat. Keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam membangun konsensus, menjaga legitimasi, serta mengakomodasi kepentingan yang beragam.

Dengan demikian, penanganan konflik dalam masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, L. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*.
- Anwar, K., & Widiani, N. (2016). *Faktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada Tahun 2012)*. Riau University.
- Chasib, A. (2024). Resolution of The Long Conflict In Papua for Equitable National Development. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1), 93–100.
- Dhiaulhaq, S., Sopyani, I., & Marsingga, P. (2024). Sebab Utama dan Pemicu Faktor Sosial Budaya Konflik Papua Barat. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 4(2), 104–113.
- Harto, U. S., Diniyanto, A., Baqil, Y., Death, C. H., & Muyassaroh, I. S. (2026). Conflict Resolution Among Political Coalitions in Indonesia's 2024 Presidential Race. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Jagad, S. P. (2026). Tantangan dan Strategi Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lombok Barat. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 2(1), 53–65.
- Marta, A., & Fuqaha, M. F. (2015). *Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik Hubungan Industrial di PT. Duta Palma Nusantara Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 2011 2014*. Riau University.

Nizar, R. N. A., & Hastri, E. D. (2024). Pendekatan Politik Hukum dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB dan ASEAN. *UIR Law Review*, 8(2), 98–120.

Sutisna, A. (2023). Analisis Faktor Faktor Non Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 100.